

## Analisis lelang pita spectrum frekuensi 3G berdasarkan peraturan lelang = The analysis of 3G spectrum auction based on auction the regulations

Hartini Chandra, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20389186&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan penelusuran asas-asas hokum umum, untuk kemudian membuat suatu interpretasi terhadap peraturan hokum umum. Selanjutnya akan dilakukan pengujian hasil interpretasi terhadap teori dan atau prinsip-prinsip hukum umum. Pelaksanaan lelang frekuensi 3G di Indonesia sudah seharusnya dikelola dengan lebih baik karena pemasukan Negara bukan pajak yang di terima dari lelang 3G di Indonesia ini tidaklah kecil jumlahnya. Dari segi hukum, penulis menyarankan merupakan hal yang lebih baik apabila Kemkominfo berkoordinasi dengan Kantor pelayanan Negara danlelang (KPKNL) agar supaya lelang 3G ini dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip dan peraturan lelang yang ada. Dilihat dari segi sosial, KPKNL memiliki sejarah yang panjangdalam menyediakan layanan jasa lelang, baik secara wajib ataupun sukarela, yang dalam hal ini dapat memberikan keuntungan dalam lelang 3G untuk Kemkominfo. Dengan dukungan yang diberikan oleh KPKNL, Kemkominfo dapat memberikan pelayanan lelang 3G dengan lebih baik lagi berdasarkan prinsip dan peraturan lelang yang ada, memaksimalkan persaingan diantara para peserta lelang, dan meminimalkan praktek-praktek kolisi, korupsi dan nepotisme di lelang 3G tersebut.

.....

In this study the authors raised title bands specktrum Analysis of 3G frequency auction by the auction rules, while the method use research by the authors is that normative juridical approach taken to conduct a search common law principles, to then make an interpretation of the common law rule. The Third Generation (?3G?) Spectrum Auctions in Indonesia should be better managed by the Government because the non-tax state revenue derived from these auctions is quite significant. From legal perspectives, the writer suggests that the Ministry of Communication and Informatics (Kemkominfo) coordinates with the State Assets and Auctions Office (KPKNL) to bring these 3G auctions in conformity with the principles and regulations of auctions. From social perspectives, KPKNL has a long history of providing auction services, both compulsory and voluntary auctions, that will give advantages to the performance of Kemkominfo?s 3G Auctions. With the support of KPKNL, Kemkominfo can perform the 3G auction smoothly in accordance with the principles and regulations of auctions, maximize competition among bidders and minimize the practices of collusion, corruption and nepotism in the 3G auctions.